

Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar

Devia Ananda Umar

Universitas Muhammadiyah Makassar

Sam'un Mukramin

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jamaluddin Arifin

Universitas Muhammadiyah Makassar

Fatimah Aziz

Universitas Muhammadiyah Makassar

Alamat: Jl Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: deviaanandaumar05@gmail.com

Abstract. *Poverty is described as the inability to meet basic needs due to lack of income, making it increasingly difficult to guarantee survival (Suryawati, 2004). When a country's poverty rate is high, the purchasing power of its citizens decreases which has a negative impact on economic growth (Fajri & Iriani, 2022). This study aims to determine the effect of economic growth on the poverty rate in Makassar City, and to determine the effect of unemployment on the poverty rate in Makassar City by using primary data and secondary data, data collection techniques, literature studies and interviews, and then analyzed qualitatively (Ishak et al., 2020). The results of the study show that the inability to access education and health and proper employment has subsequently had an impact on increasing the number of unemployed in the workforce. In other words, poverty can have an impact on unemployment and a lack of income, and then unemployment itself creates a poor community (Faizin, 2021).*

Keywords: *Poverty, Economic Growth, Unemployment*

Abstrak. Kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok karena kurangnya pendapatan, sehingga semakin sulit untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004). Ketika tingkat kemiskinan suatu negara tinggi, daya beli warganya menurun yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Fajri & Iriani, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar, dan untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar dengan menggunakan data primer dan data sekunder teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara kemudian di analisis secara kualitatif (Ishak et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketidakmampuan akses pendidikan dan kesehatan dan lapangan kerja secara layak selanjutnya berdampak pada naiknya jumlah pengangguran pada angkatan kerja. Dengan kata lain, kemiskinan bisa berdampak pada pengangguran serta kurangnya pendapatan, dan selanjutnya pengangguran itu sendiri menjadikan terbentuknya masyarakat miskin (Faizin, 2021).

Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran

Received Mei 21, 2023; Revised Juni 19, 2023; Accepted Juli 14, 2023

*Corresponding author, : deviaanandaumar05@gmail.com

LATAR BELAKANG

Istilah kemiskinan muncul pada saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan kekurangan sumber daya uang dan barang untuk dapat menjamin kebutuhan dasar dalam kehidupan. Pengertian kemiskinan menurut BPS (2008) adalah “Suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan”. (Ishak et al., 2020). Kehidupan yang sejahtera merupakan kehidupan yang diinginkan oleh semua manusia. Akan tetapi, tidak semua orang dapat merasakan hidup secara sejahtera. Salah satu cara yang dapat dilakukan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan melakukan pembangunan, salah satunya pada bidang ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi indikatornya. Menurut Adam Smith dalam Prihastuti (2018) sumber daya manusia merupakan input yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ini merupakan penyebab kesejahteraan suatu negara, yaitu pentingnya skala ekonomi dan juga kualitas manusia itu sendiri (Ningrum et al., 2020).

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sifatnya multi- dimensi, tidak hanya dikaitkan dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah sosial, budaya dan politik (Moeljarto, 1994). Pemahaman terkait dimensi ekonomi berarti kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang layak dalam istilah sosiologi disebut dengan kemiskinan absolut (Wardaya & Suprpti, 2018). Fenomena kemiskinan ekonomi umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kehidupan yang layak (Esmara, 1986), dan bergantung pada apa yang terjadi pada distribusi pendapatan dan konsumsi (Deaton, 2003) (Agustang; Andi et al., 2020). Masalah kemiskinan ini terjadi hampir di setiap provinsi di Indonesia begitu juga yang terjadi di Sulawesi Selatan termasuk di Kota Makassar yang menjadi ibu Kota Provinsi dan salah satu kota metropolitan terbesar ke-lima di Indonesia. Dimana Makassar Menjadi sebagai pusat perekonomian, pendidikan, pariwisata dan industri kondisi demikian membuat masyarakat luar tertarik untuk datang dan tinggal di Makassar dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak heran jika pertumbuhan penduduk kota makassar sangat pesat setiap tahunnya, penduduk Kota Makassar saat ini sekitar 1.508.154 juta jiwa (BPS, 2018) dengan begitu besarnya jumlah penduduk akan dapat menimbulkan dampak-dampak negatif di masyarakat (Ishak et al., 2020).

Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan Chang dan Shi (2016) menunjukkan bahwa investasi pada SDM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Dengan adanya peningkatan modal SDM maka akan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan hasil penelitian yang dilakukan Suliswanto (2010) menemukan hasil bahwa peningkatan kualitas SDM akan mampu memberikan pengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan. Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang memiliki keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif (Jhingan, 2000) (Alia Akhmad, 2021).

Kemiskinan sampai hari ini masih menjadi persoalan sosial klasik yang selalu muncul dan dialami oleh setiap wilayah (Rahmawati et al., 2022). Oleh karena itulah dalam kondisi yang urgen maka setiap wilayah yang di dalamnya diselenggarakan oleh satuan pemerintahan dituntut untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemiskinan bukan merupakan persoalan sosial yang mudah untuk diselesaikan, namun menuntut berbagai pihak untuk melakukan berbagai inovasi kebijakan yang dapat menanggulangi kemiskinan (Asih & Tamara, 2022) (Setiawan & Choirunnisa, 2023).

Zahdiyati & David (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) sangat berpengaruh terhadap kemiskinan, jika IPM suatu daerah tinggi maka kemiskinan di daerah tersebut rendah. Kemiskinan adalah persoalan yang sangat kompleks dan kronis yang membutuhkan analisis serta variabel yang tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan (Prawoto, 2009) (Artino et al., 2019).

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis (Mankiw, 2003). Menurut Sukirno dalam Meydiasari dan Soejoto (2017) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Ningrum et al., 2020).

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah

memiliki pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Nurmainah, 2013) (Utami, 2020).

Angka pengangguran masih menjadi persoalan bangsa, hal ini kelihatan dari data statistik penduduk usia kerja yang belum terserap lapangan kerja (Dan & Sosial, 2019).

Kemiskinan dan pengangguran merupakan sebuah permasalahan besar di setiap bangsa sampai di daerah, dikarenakan dua hal tersebut mempunyai pengaruh nyata bagi penduduk dan bangsa tersebut. Dalam hal menanggulangi tingkatan kemiskinan juga pengangguran, yang dijadikan sebagai fokus tujuan adalah cara wujud penanggulangan dalam menambah tingkat penghasilan secara rata dan jalan yang mudah dalam mendapatkan pendidikan, air, dan kesehatan, serta lain-lain (Nasution & Marliyah, 2023).

Ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat berdampak kepada terbentuknya jurang kemiskinan (Nisa et al., 2020). Kemiskinan itu sendiri merupakan persoalan pada setiap negara, dan seringkali menjadi permasalahan yang nyaris tidak ada ujungnya. Kemiskinan akan berakibat pada turunnya taraf hidup masyarakat sehingga berdampak pada terbatasnya pemenuhan kebutuhan setiap hari (Nasution, 2019) (Faizin, 2021).

Kemiskinan sebagai permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia sering dikaitkan dengan isu ketimpangan pendapatan (Sugiyarto dan Saleky, 2015). Menurut Barber (2008) hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan merupakan hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa ketimpangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau ketimpangan adalah bentuk dari kemiskinan. Pada tulisan Rodriguez-Paso dan Hardy (2015) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dengan ketimpangan. Hal tersebut juga searah dengan statistik yang menunjukkan bahwa memburuknya ketimpangan sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kemiskinan (Ganie-Rochman, 2013) (Nina & Rustariyuni, 2020).

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah (Yacoub, 2012) (Garnella et al., 2020).

Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat

penting disamping sumber alam, modal dan teknologi (R et al., 2013) (Pengangguran & Pembangunan, 2021).

Dalam mencapai suatu kesejahteraan, dibutuhkan keseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja, namun yang terjadi di Indonesia jumlah angkatan kerja lebih banyak dari pada kesempatan kerja, hal ini berdampak pada terjadinya kenaikan pengangguran (Sugiharto, 2007) (Dwi Radila et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan keharusan bagi pengurangan kemiskinan, namun di lain sisi pertumbuhan yang berkualitas harus efektif mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi seharusnya menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin. Oleh karena itu, pertumbuhan seharusnya dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (Vania Grace Sianturi et al., 2021).

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara dapat diukur melalui tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah menjadi upaya pencapaian target pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang sangat penting untuk melangkah ke tahapan kemajuan selanjutnya, yaitu kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan (Sitindaon, 2013) (Tingkat et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi tidaklah cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi juga sangat dibutuhkan untuk menekan kemiskinan, meskipun begitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menurunkan jumlah penduduk miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Humairo, 2014) (Kemiskinan & Pengangguran, 2021).

Pertumbuhan dalam perekonomian yaitu peningkatan kualitas beserta kuantitas produk maupun jasa yang diproduksi oleh negara dari suatu tahun ke tahun. Hal ini dapat diukur dengan indikator seperti pendapatan nasional suatu negara, pendapatan per kapita, angkatan kerja yang lebih tinggi daripada jumlah pengangguran dan kemiskinan yang menurun (Fajri & Iriani, 2022).

Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah tersebut akan bergantung pada ketersediaan dan mekanisme penggunaan anggaran yang dimiliki oleh daerah (Jasmina et al, 2001). Rusdarti (2013) menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro-poor budget*) (Susanti & Sartiyah, 2019).

Mankiw (2016) menjelaskan alasan adanya pengangguran adalah dibutuhkan waktu untuk mencocokkan antara para pekerja dengan pekerjaan. Dalam kenyataannya para pekerja memiliki preferensi dan kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Sementara arus informasi tentang calon karyawan dan lowongan kerja tidak sempurna, serta mobilitas geografis pekerja tidak instan. Atas dasar alasan ini, mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu serta usaha disebabkan pekerjaan yang berbeda membutuhkan keahlian yang berbeda serta upah yang juga berbeda (Fachrurrozi et al., 2021).

Fahrudin (2012: 96-97) menyatakan bahwa : “Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin”. Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan.

Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan (Magal et al., 2021).

KAJIAN TEORITIS

Teori Kemiskinan

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu.

Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan. Paradigma neo-liberal ini digerakan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini (Suharto, 2002). Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan (Satterthwaite (1997). Hal ini mengakibatkan bentuk-bentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian.

2. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan structural (Cheyney, O'Brien dan Belgrave (1998:79). Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006:95). Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal

ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.(Febriana, 2010)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar. Teori yang termasuk dalam penelitian ini bermuara pada dua paradigma besar yaitu Neo-Liberal dan Demokrasi-Sosial. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, agar dapat diketahui pengaruh program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan serta dengan pendekatan yang dilakukan agar dapat terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengentasan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah yang diperoleh langsung dengan lengkap dan akurat melalui survei lapangan. Penelitian ini juga menggunakan jenis data primer yaitu melalui wawancara dan data sekunder (Nasution & Marliyah, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sukirno (2006:87) mengemukakan bahwa pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Dimana, semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah yaitu kemiskinan (Ishak et al., 2020).

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi secara nasional dan global. Batas garis kemiskinan penduduk Kota Makassar mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan makanan dan non makanan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan suatu peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Sebaliknya apabila perekonomian tersebut tidak dapat berkembang dengan baik hal terburuk yang akan muncul adalah masalah pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian menurut Syurifto (2018) dalam (Zubaidi et al., 2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap pengangguran (Dwi Radila et al., 2021).

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan merupakan faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui Pendidikan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh vertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumberdaya manusia lebih cepat mengerti dan siap mengahdapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja ini dapat juga disebut sebagai kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari kerja. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut (Indrayeni et al., 2019) bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran (Dwi Radila et al., 2021).

Hasil Wawancara

Hasil wawancara diperoleh dari masyarakat lorong kategori miskin di Kecamatan Mariso Kota Makassar didapatkan bahwa mereka pasrah dari keadaan akibat ketidak mampuan dari sesi pendidikan dan pengetahuan menyebabkan pesimis dan berdampak kepada sifat malas, masyarakat lorong juga memiliki tingkat keterampilan yang sangat rendah. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka itu sama sekali tidak memiliki keterampilan yang dapat menopang usahanya. Pekerjaan sebagai tukang becak sudah menjadi tradisi yang secara turun-temurun diwariskan kepada anak-anaknya dan tampaknya tidak ada pilihan lain kecuali bekerja sebagai tukang becak atau sebagai pembantu rumah tangga bagi istri-istri mereka. Dengan begitu maka tingkat penghasilan mereka sangat rendah dan tingkat ketergantungan kepada orang lain sangat tinggi

Hasil wawancara dari para informan baik toko masyarakat ibu Ketua RT setempat maupun aparat menyatakan kemiskinan masyarakat tersebut diakibatkan karena memiliki Sifat malas untuk mengembangkan diri menjadi maju serta tingkat keterampilan yang sangat rendah yang mereka miliki. Hal ini memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah Kota Makassar. Kekurang-berhasilan dari praktek-praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap mereka, menuntut untuk ditemukannya strategi atau model pemberdayaan yang sesuai dengan keadaan mereka itu. Perlu ada strategi pemberdayaan baru yang sesuai dengan kondisi mereka itu, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Memperhatikan karakteristik masyarakat lorong sebagaimana diuraikan diatas, maka strategi pemberdayaan yang perlu dilaksanakan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat miskin tersebut.

Strategi Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di lorong-lorong Kecamatan Mariso Kota Makassar yang masih berada dalam kategori miskin mempunyai sifat malas. Mereka tidak memiliki apa yang disebut oleh Mclelland sebagai dorongan untuk berhasil. Bantuan-bantuan yang pernah diberikan kepada mereka baik yang berasal dari pemerintah kota

maupun dari perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Sudah banyak jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik berupa uang seperti yang dikenal dengan Bantuan langsung Tunai (BLT) atau dalam bentuk modal usaha tanpa angunan dengan bunga ringan.

Salah satu faktor determinan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial. Sistem sosial disini adalah sistem ekonomi dan politik. Dikatakan demikian karena diketahui bahwa dalam komunitas, hubungan antara individu dan masyarakat adalah transaksional, refleksif atau interaktif, sehingga komunitas dapat mempengaruhi individu. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memahami posisi masyarakat yang opresif dalam konteks struktur sosial dan ekonomi di mana mereka hidup. Banyaknya sentra- sentra ekonomi di kawasan Kecamatan Mariso Kota Makassar merupakan bagian dari struktur ekonomi yang sudah memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian di Kota Makassar. Sayangnya tidak semua masyarakat di Kecamatan Mariso Kota Makassar mampu memanfaatkan peluang untuk berkiprah dibalik usaha-usaha ekonomi dalam skala yang besar. Dengan keterampilan yang rendah yang mereka miliki itu, tidak dapat mengambil bagian di dalamnya sebagai aktor-aktor ekonomi apalagi mau bersaing dengan para pengusaha atau pemilik modal. Hasil pengamatan peneliti memperhatikan hubungan antara pedagang atau pengusaha sebagai pemilik modal dengan masyarakat miskin di Kecamatan Mariso Kota Makassar yang sangat jauh dari konsep simbiosis mutualisme tersebut diharapkan perlu adanya peran pemerintah kota untuk menjembatani pola hubungan-hubungan mereka. Misalnya saja bagaimana supaya pihak pemodal ingin untuk memanfaatkan tenaga dari masyarakat miskin tersebut untuk dipekerjakan sesuai dengan tingkat keterampilan yang mereka miliki. Mungkin saja mereka itu hanya diposisikan sebagai buruh atau sejenisnya, sehingga keberadaan komunitas pedagang atau pengusaha itu dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat miskin. Dengan begitu, maka ada upaya dan merupakan salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat miskin tersebut.

Melihat keadaan masyarakat yang sulit untuk keluar dari lilitan kemiskinan tersebut diperlukan keseriusan pemerintah kota untuk mencarikan solusi dari permasalahan sosial yang dihadapi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa telah banyak program-program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah tetapi tetap saja posisi mereka dalam kategori miskin. Bantuan-bantuan dari pemerintah, Pada program pemberian beras miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, bantuan lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat program

bantuan modal yang bergulir dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari program tersebut adalah untuk memandirikan masyarakat miskin, sehingga sekalipun program itu tidak lagi bergulir atau sudah selesai, masyarakat sasaran tetap dapat melanjutkan usahanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka program pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (i) Penetapan dan pengenalan wilayah kerja; (ii) Sosialisasi kegiatan; (iii) Penyadaran masyarakat; (iv) Pengorganisasian masyarakat; (v) Pelaksanaan kegiatan; (vi) Advokasi kebijakan; (vii) Politisasi.

Penyadaran masyarakat; dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang” keberadaannya”, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Penyadaran masyarakat adalah bersama-sama masyarakat melakukan analisis keadaan yang menyangkut potensi dan masalah, serta analisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya. Melakukan analisis akar-masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan. Menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya, termasuk merumuskan prioritas perubahan, tahapan perubahan, cara melakukan dan mencapai perubahan, sumberdaya, yang diperlukan, maupun peran bantuan (modal, teknologi, manajemen, kelembagaan, dan lain- lain yang diperlukan. Determinan kemiskinan masyarakat lorong atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat lorong selain karena faktor struktural juga lebih disebabkan oleh faktor kultural. Sifat malas dan cepat pasrah kepada nasib adalah determinan utama kemiskinan mereka. Dikatakan demikian karena secara struktural, pemerintah kota telah berbagai upaya yang diberikan kepada mereka supaya berdaya dalam arti ekonomi tetapi karena kultur yang dianutnya itu sehingga sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Sifat malas yang sudah menjadi kebiasaan dan secara turun-temurun itu juga diturunkan kepada anak-anaknya. Pada setiap hari, mereka yang bekerja sebagai tukang becak keluar rumah untuk mencari nafkah nanti pada pukul 09.00 Wita, dan ketika peneliti menanyakan berapa penghasilannya yang didapat setiap hari. Tukang becak itu, hanya menjawab bahwa penghasilan itu tergantung kepada nasib. Kalau lagi nasib baik maka penghasilan lancar, tetapi kalau nasib buruk kadang-kadang untuk pembeli rokok pun sulit didapat.

Uraian informan di atas menjelaskan bahwa nilai-nilai yang mereka anut sangat sulit untuk diubah. Upaya penyadaran tentang nilai-nilai instrumental yang memandang kerja untuk kerja dan mencari nafkah yang halal sebanyak mungkin, sangat sulit untuk mereka terima.

Perlu waktu yang lama dalam memberikan edukasi kepada mereka tentang nilai-nilai kerja. Pendidikan adalah salah satu alternatif untuk mengubah pandangan mereka.

Pemecahan Masalah melalui Proses Pemberdayaan (empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. Menurut Rappaport (1985), praktek dan kegiatan yang berbasiskan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita (inner space), orang-orang lain yang kita anggap penting, serta masyarakat di sekitar kita. Elaborasi dari pemikiran tersebut, secara keseluruhan, akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan sehingga akan membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Strategi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mariso Kota Makassar, dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut: (i) Penetapan dan pengenalan wilayah kerja; (ii) Sosialisasi kegiatan; (iii) Penyadaran masyarakat; (iv) Pengorganisasian masyarakat; (v) Pelaksanaan kegiatan dan (vi) Advokasi kebijakan.
2. Sebagian masyarakat yang bermukim di lorong-lorong Kota Makassar tetap miskin walaupun sudah ada beberapa program pemberdayaan yang diberikan karena masyarakat lorong tersebut memiliki sifat malas dalam bekerja, serta cenderung pasrah kepada nasib. Selain itu, mereka juga memiliki tingkat keterampilan yang rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat menopang kehidupan mereka.
3. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa saran sebagai yaitu Pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap jumlah rumah tangga miskin khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar, untuk kemudian mencari solusi pemberdayaan yang dapat memandirikan keluarga miskin tersebut. Pemerintah Kecamatan Mariso perlu melakukan pendataan terhadap jumlah perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Mariso untuk kemudian mendorong perusahaan tersebut untuk melaksanakan tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Mariso tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Agustang; Andi, Suardi, Mutiara; Ainun, & Ramlan; Herdianty. (2020). Social Preneur Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. *martabe : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 331–342. <https://doi.org/10.31604/jpm.v3i2.331-342>
- Alia Akhmad, k. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(6), 175. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/419>

- Artino, a., Juanda, b., & Mulatsih, s. (2019). Keterkaitan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara. *Tataloka*, 21(3), 381. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.381-389>
- Dan, p., & Sosial, k. (2019). *issn : 2599-1965 (Online) issn : 2598-6317 (Cetak) issn : 2599-1965 (Online) issn : 2598-6317 (Cetak)*. 3(1), 47–54.
- Dwi Radila, i., Priana, w., & Wahed, m. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kemiskinan terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali. *Jurnal Health Sains*, 2(6), 1054–1065. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.252>
- Fachrurrozi, k., Fahmiwati, Hakim, l., Aswadi, & Lidiana. (2021). Pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas di indonesia di tahun 2019. *Jurnal Real Riset*, 3(2), 173–178. <https://doi.org/10.47647/jrr>
- Faizin, m. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada Ipm di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Fajri, a. a., & Iriani, R. (2022). Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2002-2021. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 53–66. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2555>
- Garnella, r., a. Wahid, n., & Yulindawati, y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 21–35. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v1i1.104>
- Ishak, r. a., Zakaria, j., & Arifin, m. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i2.463>
- Kemiskinan, d., & Pengangguran, d. a. n. (2021). *Determinasi kemiskinan dan pengangguran di indonesia*. 28(1), 25–36.
- Magal, p., Kawung, g. m. v., & Maramis, m. t. b. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal emba*, 9(1), 462–469.
- Nasution, r., & Marliyah, m. (2023). Analisis Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. *Jesya*, 6(1), 810–823. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1031>
- Nina, g. a., & Rustariyuni, s. d. (2020). Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 24–36. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.28>
- Ningrum, j. w., Khairunnisa, a. h., & Huda, n. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (ipm). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212–222.
- Pengangguran, p., & Pembangunan, I. (2021). *Tata kelola*.
- Setiawan, h., & Choirunnisa, c. (2023). Penyuluhan Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis

Masyarakat di Desa Simpar Kabupaten Batang. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.34312/ljpm.v2i1.17638>

Susanti, e. n., & Sartiyah. (2019). Determinants of Poverty In The Riau Islands Province. *Dimensi*, 8(2), 249–265.

Tingkat, p., Dan, p., & Sidoarjo, k. (2022). *independent : Journal Of Economics e-issn : 2798-5008*. 2, 16–30.

Utami, farathika putri. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (ipm), Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/2303>

Vania Grace Sianturi, m. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>